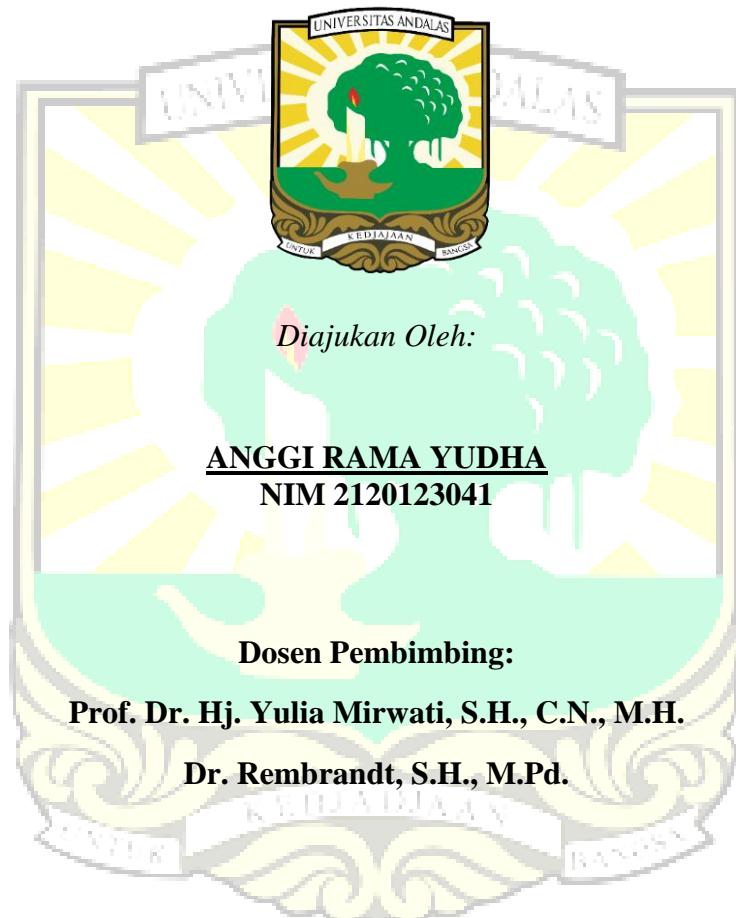


## **IMPLIKASI HUKUM COVERNOTE DALAM PENCAIRAN KREDIT**

(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman)

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan umtuk Memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

## **IMPLIKASI HUKUM *COVERNOTE* DALAM PENCAIRAN KREDIT**

(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman)  
(Anggi Rama Yudha, 2120123041, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

### **ABSTRAK**

Menurut Habib Adjie, bahwa *covernote* yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah *living law* kenotariatan saja, artinya kebiasaan atau hukum yang hidup dan dilakukan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dilakukan oleh para notaris yang sebelumnya kemudian diikuti oleh notaris-notaris berikutnya sampai dengan sekarang mungkin sampai dengan notaris yang akan datang. *Covernote* secara umum merupakan sebuah catatan penutup yang digunakan sementara sebagai bukti bahwa seseorang dijamin apa yang telah dibuat di hadapannya selaku notaris sampai selesai. Sehingga kalau urusan yang terdapat di *covernote* telah selesai maka *covernote* tersebut sudah tidak ada artinya. Sebagaimana yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman, penulis melihat bahwa *covernote* digunakan dalam melakukan pencairan kredit. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa: 1) Kewenangan notaris dalam penerbitan *covernote* sebagai syarat pencairan kredit perbankan dan 2) Implikasi *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kantor cabang Pariaman. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data primer sebagai bahan utama dalam pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa: Kewenangan notaris terhadap penerbitan *covernote* sebagai syarat pencairan kredit perbankan tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris maupun peraturan lainnya. Sehingga *covernote* tidak memiliki dasar hukum. *Covernote* dibuat oleh Notaris yang ditujukan kepada bank agar bank mengetahui sampai sejauh mana pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh notaris. Implikasi *covernote* dalam pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kantor cabang Pariaman hampir pada semua aktifitas pencairan kredit terutama saat pengurusan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang mana untuk pengurusan APHT tersebut menyita waktu selama 14 (empat belas) hari. Sehingga untuk mempercepat pencairan kredit debitur bank meminta agar notaris mengeluarkan surat keterangan (*covernote*) yang memuat isi bahwa pekerjaan yang sedang diproses telah dilakukan oleh notaris.

Kata Kunci: Implikasi, *Covernote*, Pencairan Kredit Perbankan.

## **IMPLICATIONS OF COVERNOTE IN CREDIT DISBURSEMENT**

(*Study at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Branch Office Pariaman*)

(*Anggi Rama Yudha, 2120123041, Master of Notary Program, Postgraduate*)

*Faculty of Law, Andalas University, Padang)*

### **ABSTRACT**

*According to Habib Adjie, the covernote made by a Notary is only a notarial living law, meaning a habit or law that lives and is carried out by notaries in carrying out their duties. Carried out by previous notaries, then followed by subsequent notaries until now, perhaps until future notaries. Covernotes are generally a closing note that is used temporarily as evidence that someone is guaranteed what has been made before him as a notary until completion. So if the business contained in the covernote has been completed, the covernote has no meaning. Similar to what happened at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pariaman Branch Office, the author saw that covernotes were used in disbursing credit. Therefore, this study aims to analyze: 1) The authority of notaries in issuing covernotes as a condition for disbursing bank credit and 2) The implications of covernotes in disbursing credit at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pariaman branch office. This study is descriptive, using an empirical legal approach method, primary data as the main material in the study of secondary legal materials. Based on the research, it was found that: The authority of a notary to issue a covernote as a condition for disbursement of bank credit is not regulated in the notary law or other regulations. So that the covernote has no legal basis. The covernote is made by a notary addressed to the bank so that the bank knows to what extent the work has been done by the notary. The implications of the covernote in the disbursement of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk branch office Pariaman are almost in all credit disbursement activities, especially when processing the Deed of Granting Mortgage Rights, which takes 14 (fourteen) days to process the APHT. So that in order to speed up the disbursement of credit, the bank's debtor asks the notary to issue a certificate (covernote) containing the contents that the work being processed has been carried out by the notary.*

*Keywords: Implications, Covernote, Bank Credit Disbursement.*